

1. 13. Penataan Organisasi	1. 14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. 15. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN								
1. 1. Nilai SAKIP	2. 1. Persentase tersusunnya laporan keuangan OPD yang tepat waktu	3. 1. Persentase barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	1. 1. Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan yang selaras dan tepat waktu	2. 1. Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3. 1. Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. 1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2. 1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3. 1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. 1. Persentase Penelitian yang dimanfaatkan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2. 1. Persentase Penelitian yang dimanfaatkan di bidang sosial dan Kependudukan	3. 1. Persentase Penelitian yang dimanfaatkan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. 1. Persentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	6. 1. Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung administrasi umum perangkat daerah	7. 1. Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. 1. Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						4. 1. Persentase OPD yang melakukan inovasi dan Teknologi		
SUB KEGIATAN											
1. 1. 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. 1. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. 1. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2. 1. 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2. 1. 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2. 1. 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik	3. 1. 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 1. 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3. 1. 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4. 1. 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4. 1. 2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4. 1. 3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. 1. 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. 1. 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. 1. 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. 1. 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2. 1. 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2. 1. 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	3. 1. 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3. 1. 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 1. 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4. 1. 4. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4. 1. 5. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4. 1. 6. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. 1. 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. 2. 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. 2. 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. 1. 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2. 2. 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2. 2. 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3. 1. 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3. 1. 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3. 2. 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4. 1. 7. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	4. 1. 8. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	4. 1. 9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa

1. 2. 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. 2. 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1. 2. 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2. 2. 3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2. 3. 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2. 3. 2. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	3. 2. 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3. 2. 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3. 2. 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4. 1. 10. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	4. 1. 11. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	4. 1. 12. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
1. 2. 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1. 2. 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. 2. 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2. 3. 3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2. 4. 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2. 4. 2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3. 2. 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 2. 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3. 2. 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4. 1. 13. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	4. 1. 14. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4. 1. 15. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	
1. 3. 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. 3. 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. 3. 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2. 4. 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				3. 2. 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3. 3. 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 3. 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4. 2. 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4. 2. 2. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. 2. 3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
1. 3. 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1. 3. 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. 3. 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3. 3. 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3. 3. 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3. 3. 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4. 2. 4. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	4. 2. 5. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	4. 2. 6. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
1. 3. 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. 4. 1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. 4. 2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					3. 3. 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3. 3. 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3. 3. 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4. 2. 7. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4. 2. 8. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. 2. 9. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

1. 4. 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1. 4. 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1. 4. 5. Pengolahan Data Retribusi Daerah
1. 4. 6. Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1. 4. 7. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. 5. 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1. 5. 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. 5. 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. 5. 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1. 5. 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. 5. 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1. 5. 7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
1. 5. 8. Pemindahan Tugas ASN	1. 5. 9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. 5. 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. 5. 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. 6. 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. 6. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. 6. 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. 6. 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. 6. 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1. 6. 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. 6. 7. Penyediaan Bahan/Material	1. 6. 8. Fasilitas Kunjungan Tamu
1. 6. 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. 6. 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. 6. 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. 7. 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. 7. 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. 7. 3. Pengadaan Alat Besar
1. 7. 4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1. 7. 5. Pengadaan Mebel	1. 7. 6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. 2. 10. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4. 2. 11. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	4. 3. 1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. 3. 2. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4. 3. 3. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	4. 3. 4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
4. 3. 5. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	4. 3. 6. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	4. 3. 7. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
4. 3. 8. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	4. 3. 9. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4. 3. 10. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
4. 3. 11. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4. 3. 12. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	4. 3. 13. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
4. 4. 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4. 4. 2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4. 4. 3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
4. 4. 4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	4. 4. 5. Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	

1. 7. 7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1. 7. 8. Pengadaan Aset Tak Berwujud	1. 7. 9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. 7. 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. 8. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. 8. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. 8. 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. 8. 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 9. 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. 9. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. 9. 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1. 9. 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1. 9. 5. Pemeliharaan Mebel	1. 9. 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 9. 7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1. 9. 8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1. 9. 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 9. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. 9. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. 9. 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
1. 10. 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. 11. 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. 11. 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1. 11. 3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. 11. 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. 12. 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
1. 12. 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1. 12. 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1. 13. 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
1. 13. 2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. 13. 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. 13. 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
1. 13. 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. 14. 1. Fasilitas Keprotokolan	1. 14. 2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan
1. 14. 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1. 15. 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1. 15. 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

1. 15. 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1. 16. 1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1. 16. 2. Fasilitasi Fraksi DPRD	INDIKATOR SUB KEGIATAN								
1. 1. 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. 1. 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. 1. 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2. 1. 1. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2. 1. 2. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2. 1. 3. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3. 1. 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 1. 2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3. 1. 3. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4. 1. 1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4. 1. 2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4. 1. 3. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. 1. 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1. 1. 5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1. 1. 6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. 1. 4. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2. 1. 5. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2. 1. 6. Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3. 1. 4. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3. 1. 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 1. 6. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4. 1. 4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4. 1. 5. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4. 1. 6. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. 1. 7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. 2. 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1. 2. 2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. 1. 7. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2. 2. 1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2. 2. 2. Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3. 1. 7. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3. 1. 8. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3. 2. 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4. 1. 7. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	4. 1. 8. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	4. 1. 9. Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
1. 2. 3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. 2. 4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1. 2. 5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2. 2. 3. Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2. 3. 1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2. 3. 2. Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3. 2. 2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3. 2. 3. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3. 2. 4. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4. 1. 10. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	4. 1. 11. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	4. 1. 12. Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik

1. 2. 6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1. 2. 7. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. 2. 8. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2. 3. 3. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2. 4. 1. Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2. 4. 2. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3. 2. 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 2. 6. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3. 2. 7. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4. 1. 13. Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	4. 1. 14. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4. 1. 15. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
1. 3. 1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. 3. 2. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. 3. 3. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2. 4. 3. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			3. 2. 8. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3. 3. 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. 3. 2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4. 2. 1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4. 2. 2. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. 2. 3. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
1. 3. 4. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1. 3. 5. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. 3. 6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3. 3. 3. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3. 3. 4. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3. 3. 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4. 2. 4. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	4. 2. 5. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	4. 2. 6. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
1. 3. 7. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. 4. 1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1. 4. 2. Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				3. 3. 6. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3. 3. 7. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3. 3. 8. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4. 2. 7. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4. 2. 8. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. 2. 9. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
1. 4. 3. Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1. 4. 4. Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1. 4. 5. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah							4. 2. 10. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4. 2. 11. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	4. 3. 1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. 4. 6. Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1. 4. 7. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. 5. 1. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1. 5. 2. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1. 5. 3. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. 5. 4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1. 5. 5. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. 5. 6. Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1. 5. 7. Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
1. 5. 8. Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1. 5. 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1. 5. 10. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. 5. 11. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. 6. 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1. 6. 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1. 6. 3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1. 6. 4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1. 6. 5. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
1. 6. 6. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1. 6. 7. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1. 6. 8. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
1. 6. 9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. 6. 10. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. 6. 11. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. 3. 2. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4. 3. 3. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	4. 3. 4. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
4. 3. 5. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	4. 3. 6. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	4. 3. 7. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
4. 3. 8. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	4. 3. 9. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4. 3. 10. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
4. 3. 11. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4. 3. 12. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	4. 3. 13. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
4. 4. 1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4. 4. 2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4. 4. 3. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
4. 4. 4. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4. 4. 5. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	

1. 7. 1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1. 7. 2. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1. 7. 3. Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
1. 7. 4. Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1. 7. 5. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1. 7. 6. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1. 7. 7. Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1. 7. 8. Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1. 7. 9. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
1. 7. 10. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1. 7. 11. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1. 8. 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. 8. 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1. 8. 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1. 8. 4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1. 9. 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1. 9. 2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1. 9. 3. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
1. 9. 4. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1. 9. 5. Jumlah Mebel yang Dipelihara	1. 9. 6. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1. 9. 7. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1. 9. 8. Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1. 9. 9. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1. 9. 10. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. 9. 11. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. 9. 12. Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi
1. 10. 1. Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1. 11. 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. 11. 2. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
1. 11. 3. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. 11. 4. Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. 12. 1. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
1. 12. 2. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1. 12. 3. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1. 13. 1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1. 13. 2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. 13. 3. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. 13. 4. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
1. 13. 5. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. 14. 1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1. 14. 2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1. 14. 3. Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1. 15. 1. Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	1. 15. 2. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
1. 15. 3. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	1. 16. 1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1. 16. 2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD
1. 16. 3. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1. 16. 4. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat



RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si
NIP. 19660804 199003 1 012